

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi KPI di Inspektorat Kabupaten Kendal telah dicoba. Dalam praktiknya, KPI menjadi panduan yang penting untuk mendukung pengawasan yang terstruktur melalui Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Key Performance Indicators* (KPI) oleh Inspektorat Kabupaten Kendal telah mencapai skor **90,50**, dengan kategori sangat baik. Capaian ini mencerminkan upaya yang signifikan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Angka ini juga menggambarkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, skor ini mengindikasikan masih adanya ruang untuk perbaikan dalam penerapan beberapa indikator tertentu. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan resistensi terhadap perubahan tetap menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Dengan meningkatkan pelatihan, sosialisasi, dan pengawasan yang lebih terukur, diharapkan skor ini dapat ditingkatkan lebih lanjut, sehingga tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Kendal dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

Implementasi ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan SDM pengawas, kurangnya anggaran yang memadai, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan lebih efektif.

Frekuensi pengawasan terhadap desa juga terbatas dengan rotasi pengawasan regular yang hanya dapat dilakukan setiap 7-10 tahun sekali untuk setiap desa. Meskipun demikian, adanya pendampingan yang intensif dan konsultasi teknis oleh Inspektorat telah membantu kepala desa memahami KPI, terutama dalam perencanaan dan pengelolaan

anggaran.

2. KPI di Inspektorat Kendal telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, terutama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya KPI, desa Ngampel Wetan terbukti sudah mempublikasikan informasi anggaran dan pelaksanaan proyek secara lebih terbuka melalui papan informasi atau media lainnya. Akuntabilitas kepala desa juga meningkat terlihat dari pelaporan yang lebih tertib dan sesuai dengan aturan. Pendampingan oleh Inspektorat juga mendorong kolaborasi antara aparat desa dan masyarakat dalam perencanaan Pembangunan. Namun, efektivitas ini masih terbatas pada aspek administratif, sedangkan pengawasan teknis di lapangan belum maksimal akibat kurangnya personil untuk terjun langsung dan masih minim kompetensi teknis untuk mengelola KPI ini.
3. Penerapan KPI di Inspektorat Kendal berperan penting dalam menekan praktik korupsi di Tingkat desa terutama melalui pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran. Desa dapat jauh lebih tertib dalam penyusunan PBDes ketika tahu acuan dari ketentuan yang berlaku. Inspektorat juga dapat dengan mudah menangani pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dan memberikan klarifikasi atau tindakan korektif dengan mudah ketika dapat di track dengan KPI secara komprehensif. Meski begitu, kelemahan dalam pengawasan teknis terhadap proyek-proyek fisik masih membuka peluang untuk adanya penyimpangan. Hambatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung yang memadai.

4.2 Saran

1. Untuk memperkuat pondasi implementasi KPI, Inspektorat Kabupten Kendal perlu meningkatkan jumlah kompetensi SDM pengawas melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, anggaran pengawasan harus diperluas untuk mendukung penyediaan fasilitas seperti penerapan teknologi digital yang mempermudah pengawasan secara real-time untuk

mempermudah flow KPI juga. Penyusunan pedoman teknis yang lebih spesifik terkait KPI juga dapat membantu mempermudah penerapannya di lapangan. Memperbanyak sesi pendampingan dan coaching clinic akan memastikan pemahaman yang lebih baik bagi aparatur desa, sehingga KPI dapat diterapkan secara konsisten.

2. Untuk meningkatkan efektivitas KPI dalam *good governance*, Inspektorat perlu memperluas pengawasan hingga ke aspek teknis proyek di lapangan dengan melibatkan tenaga ahli atau Kerjasama lintas instansi kalau dirasa belum memiliki SDM yang mumpuni. Inspektorat juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung transparansi, seperti dashboard monitoring online yang memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan memantau realisasi data, anggaran, dan progress dari desa. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan Evaluasi desa juga perlu terus dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan khusus agar KPI dapat berjalan dengan optimal.
3. Inspektorat perlu meningkatkan intensitas pengawasan, terutama pada aspek teknis pelaksanaan proyek fisik di desa. Mengoptimalkan peran masyarakat sebagai pengawas independen juga dapat membantu meminimalkan potensi korupsi di desa. Misalnya dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara lebih aktif. Penggunaan sistem pelaporan berbasis teknologi, seperti web atau aplikasi aduan *online* juga dapat mempercepat deteksi dini terhadap indikasi korupsi. Edukasi anti korupsi secara rutin kepada aparatur desa dan masyarakat akan memperkuat budaya integritas yang menjadi kunci pencegahan korupsi.